

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERKOTAAN DALAM PEMERATAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DI DESA SUMOLAWANG KECAMATAN PURI KABUPATEN MOJOKERTO**

**Eva Nurmalia**

13040254093 (PPKn, FISH,UNESA)nurmaliaeva2112@gmail.com

**Agus Satmoko Adi**

0016087208 (PPKn, FISH,UNESA)agussatmoko@unesa.ac.id

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan. Teori yang digunakan adalah teori Gestalt oleh Krech dan Crutchfield. Penelitian ini menggunakan desain penelitian Kualitatif. Informan penelitian ini adalah masyarakat Desa Sumolawang yang menerima dan tidak menerima pinjaman dana bergulir PNPM Mandiri Perkotaan. Data dikumpulkan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis melalui Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sumolawang menggambarkan bahwa PNPM Mandiri Perkotaan yang dilaksanakan di Desa Sumolawang telah memberikan akses kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya namun pada proses sosialisasi, pemerataan, dan pemberdayaan perlu diperbaiki. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diharapkan agar Pemerintah meningkatkan proses sosialisasi, pemerataan, dan pemberdayaan. Selain itu juga perlu dibenahi aturan pelaksanaan dalam buku pedoman pelaksana PNPM Mandiri, agar para pelaksana dapat memberikan proses sosialisasi, pemerataan, dan pemberdayaan yang lebih berkualitas dan efektif untuk kedepannya.

Kata Kunci: Persepsi Masyarakat, PNPM Mandiri Perkotaan

**Abstract**

This study aims to describe the public perception of the National Community Empowerment Program (NCEP) Independent Urban. The theory used is Gestalt theory by Krech and Crutchfield. This research uses Qualitative research design. The informants of this research are Sumolawang villagers who accept and do not receive NCEP Independent Urban revolving fund loan. Data were collected using interview and documentation techniques. Data were analyzed through Data Collection, Data Reduction, Data Presentation, and Withdrawal Conclusion. The results of the research on community perceptions of NCEP Independent Urban in Sumolawang village illustrate that NCEP Independent Urban implemented in Sumolawang Village has given access to the community to improve their welfare but in the process of socialization, equity and empowerment needs to be improved. Based on the research that has been done is expected that the Government improve the process of socialization, equity, and empowerment. In addition, it should also fix the rules of implementation in the NCEP Independent implementer manual, so that the implementers can provide a process of socialization, equity, and empowerment of a more qualified and effective for the future.

Keywords: Public Perception, NCEP of Independent Urban

**PENDAHULUAN**

Kemiskinan menjadi masalah yang sangat kompleks, karena hal tersebut berkaitan langsung dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Persoalan kemiskinan ini dipicu oleh banyaknya masyarakat yang menjadi pengangguran dalam bekerja, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan, dan papan), ketiadaan akses terhadap kebutuhan dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, dan transportasi), dan ketiadaan jaminan masa depan. Tingkat kemiskinan di Indonesia setiap tahunnya tergolong masih sangat tinggi.

Pada tahun 2014 yaitu 27,73 juta jiwa (10,96 persen). Dibandingkan pada tahun 2015 yaitu jumlah masyarakat miskin yaitu 28,59 juta jiwa (11,22 persen), bahwa jumlah masyarakat miskin dari tahun 2014 sampai 2015 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 0.86 juta jiwa. Sedangkan pada tahun 2016 jumlah masyarakat miskin berkurang menjadi 28,01 juta jiwa (11,13 persen), namun jumlah masyarakat miskin dari tahun 2015 sampai tahun 2016 tidak banyak perubahan dan bisa dikatakan masyarakat Indonesia tetap mengalami kemiskinan (Badan Pusat Statistik tahun 2016).

Tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia yang tergolong masih tinggi dan susah untuk dipecahkan menjadi pekerjaan rumah untuk Pemerintah Indonesia. Pemerintah dituntut untuk mengupayakan berbagai cara sebagai bentuk perwujudan tujuan bangsa Indonesia yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu; (1) Membentuk suatu Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) Memajukan kesejahteraan umum/bersama; (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) Ikut berperan aktif dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dari tujuan bangsa Indonesia tersebut, tujuan yang kedua adalah “Memajukan kesejahteraan umum”, yang artinya adalah memperhatikan, menjaga, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jika disinggung dengan kata kesejahteraan maka disini hal yang lebih kompleks adalah mencakup kemampuan masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berkaitan dengan program yang dapat membantu mengentaskan kemiskinan tersebut, hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah proses pemerataan. Berbagai program yang telah dibuat oleh pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan, belum membuahkan hasil secara signifikan. Terlihat dari beberapa masyarakat perdesaan yang berbondong-bondong ke daerah perkotaan dengan tujuan mendapatkan pekerjaan, namun kenyataannya adalah menambah tingkat pengangguran. Masyarakat perdesaan sebenarnya membutuhkan lapangan kerja di daerah perdesaan agar tidak berbondong-bondong ke daerah perkotaan dan menambah angka pengangguran. Meningkatkan lapangan pekerjaan tidak terlepas dari munculnya para wirausaha-wirausaha yang berpotensi di daerah perkotaan maupun di daerah perdesaan. Kendala yang dihadapi dalam menumbuhkan wirausaha-wirausaha di daerah perdesaan adalah permodalan untuk membuka usaha.

Pemerintah Indonesia pada tahun 2007 melalui Presiden telah membuat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. PNPM Mandiri adalah salah satu program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengentasan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di tingkat perdesaan dan perkotaan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. PNPM Mandiri dilaksanakan sesuai dengan proses partisipatif, kesadaran kritis, dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin yang ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan lagi objek melainkan sebagai subjek upaya penanggulangan kemiskinan (Royat, 2008:8).

Menurut Royat (2008:8) PNPM Mandiri dilaksanakan sesuai dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan memperbaiki stabilitas social dan local governance, serta menciptakan aset untuk kelompok miskin. Kelompok masyarakat yang ada bertujuan untuk menjadi model penjangkaran pengaman sosial. Pemerintah sendiri berupaya agar melalui penyaluran PNPM Mandiri ini, masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

PNPM Mandiri tidak hanya berada dalam lingkup individu miskin, tetapi juga pada lingkup infrastruktur seperti jalan desa dan progam fisik yang lain untuk memudahkan akses masyarakat. Melalui PNPM Mandiri diharapkan individu miskin memiliki kekuatan dalam memberdayakan kehidupannya. Pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena program itu langsung dari usulan masyarakat sehingga lebih tepat, lebih baik, dan tidak ada kebocoran (Kementrian Pekerjaan Umum tahun 2010). Fokus utama pemerintah dalam PNPM Mandiri adalah mengentaskan kemiskinan dengan metode pembangunan yang partisipatif dari masyarakat.

Pembangunan partisipatif adalah pendekatan pembangunan yang sesuai dengan hakikat otonomi daerah yang meletakkan landasan pembangunan yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri oleh masyarakat dan hasilnya dinikmati oleh seluruh masyarakat (Sumaryadi, 2005:87). Melalui program-program pembangunan partisipatif diharapkan semua elemen masyarakat dapat berpartisipasi dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk dikembangkan. Partisipasi masyarakat, secara tidak langsung dapat mengembangkan pembangunan dalam bidang fisik dan non fisik yaitu berupa karakter yang sesuai dengan budaya masing-masing daerah.

Berbagai instrumen hukum berupa Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi pintu partisipasi masyarakat dalam membuat kebijakan publik dan monitoring pembangunan sudah dikeluarkan sejak tahun 1999. UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah secara substantif menempatkan partisipasi masyarakat sebagai instrumen yang sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah dan berguna untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan sosial, menciptakan perasaan mempunyai pemerintah, jaminan keterbukaan, akuntabilitas dan kepentingan umum, adanya aspirasi rakyat, dan sebagai sarana untuk agregasi kepentingan dan mobilisasi dana.

Pada masa pemerintahan orde baru tahun 1993/1994 terdapat program IDT (Inpres Desa tertinggal) yang merupakan program manivestasi dari Instruksi Presiden

Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan melalui bantuan dana bergulir untuk Desa tertinggal dengan Dana 20 Juta setiap Desa. Kemudian diikuti dengan bantuan dana yang bergulir muncul di program PNPM Mandiri untuk mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia yang diluncurkan pada tanggal 30 April 2007 tepatnya di kota palu Sulawesi Tengah berdasarkan keputusan 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan merupakan suatu program pemerintah untuk mengatasi kemiskinan berbasis pemberdayaan kepada masyarakat miskin yang salah satu komponen programnya yaitu BLM (Bantuan Langsung Masyarakat). Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar Rp750 juta sampai Rp3 miliar per kecamatan, tergantung jumlah penduduk. Mengingat beragamnya tata cara dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat yang ada di berbagai sektor, maka untuk pelaksanaan PNPM Mandiri perlu hanya ada satu pedoman umum sebagai kerangka acuan bersama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian berbagai program pemberdayaan masyarakat. Adapun secara operasional tetap akan dilaksanakan oleh masing-masing sektor.

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kementerian Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana pinjaman/hibah luar negeri dari sejumlah lembaga pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia. Seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.

PNPM Mandiri adalah sebuah singkatan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. PNPM Mandiri memiliki berbagai macam program dimana semua program tersebut merupakan program-program yang mendukung koordinasi PNPM Mandiri (Royat, 2008:49), antara lain PNPM Mandiri Perdesaan; PNPM Mandiri Perkotaan; PNPM Mandiri Generasi; PNPM Mandiri RESPEK; PNPM Mandiri Pasca Bencana; PNPM Mandiri R2PN; dan PNPM Mandiri Pariwisata

Dari semua program-program PNPM Mandiri yang ada, Desa Sumolawang mengikuti PNPM Mandiri Perkotaan sejak tahun 2010. Alasan mendapatkan bantuan PNPM Mandiri Perkotaan tersebut dikarenakan

masyarakat di Desa Sumolawang banyak yang memiliki keunggulan dan kreativitas dalam mengembangkan sumber daya yang dimiliki untuk membuka usaha sendiri tetapi kurang memiliki modal. Dimaksudkan melalui PNPM Mandiri Perkotaan tersebut, masyarakat di Desa Sumolawang mampu menciptakan usaha dan lapangan kerja sendiri dalam bentuk Usaha Kecil Menengah (UKM). Desa Sumolawang memiliki berbagai UKM diantaranya yaitu usaha sepatu rumahan, usaha sarung tangan dan masker rumahan, serta pabrik rumahan pembuatan krupuk. PNPM Mandiri Perkotaan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sumolawang yang terdiri dari empat dusun yaitu Sumolawang, Pohgurih, Padangan, dan Balonglombok.

Novitasari (2011:35) mengungkapkan ada 3 jenis kegiatan yang dinamakan tri daya dalam pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, yaitu; (a) Ekonomi, dalam bentuk penegelolaan BLM (Bantuan langsung masyarakat) yaitu Pinjaman Dana Bergulir oleh KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat); (b) Lingkungan/Fisik, yaitu perbaikan sarana dan fasilitas desa; dan (c) Sosial, yaitu dalam bentuk santunan anak yatim, lansia, dan keluarga miskin. Santunan yang diberikan adalah hasil dari laba KSM.

Dari beberapa jenis kegiatan yang ada, kegiatan yang terus berjalan di Desa Suolawang hingga saat ini adalah kegiatan ekonomi pinjaman dana bergulir. Masyarakat mengajukan pinjaman melalui kelompok-kelompok yang terdiri dari 6 orang disetiap proposal yang di ajukan untuk mendapatkan bantuan dana, dimana dana tersebut dapat dijalankan secara berkelompok ataupun individu. Namun dana yang diperoleh dikembalikan dalam bentuk angsuran perbulan dengan kurung waktu 10 bulan kepada pelaksana program (bendahara PNPM Mandiri Perkotaan).

Program PNPM Mandiri Perkotaan telah berjalan di Desa Sumolawang terhitung sejak tahun 2010 hingga saat ini. Persepsi masyarakat terhadap program PNPM Mandiri Perkotaan merupakan landasan atau dasar utama bagi keberhasilan PNPM Mandiri Perkotaan. Berbagai hal yang terjadi dan menjadi pengalaman yang kurang menyenangkan sering mengakibatkan warga masyarakat kurang mampu bersikap terbuka untuk secara jujur menyatakan persepsi dan pandangannya tentang program PNPM Mandiri Perkotaan yang diselenggarakan. Para pelaksana program tidak mendapatkan banyak masukan terkait kekurangan ataupun solusi meningkatkan kualitas program karena masyarakat tidak terbuka dalam menyampaikan pandangannya. Keadaan yang demikian itu bila sering terjadi akan mengakibatkan kurang lancarnya usaha pencapaian tujuan program secara utuh dan mantap (Sutopo, 1996:132).

Proses dan persepsi seseorang tidak mudah diungkapkan secara lengkap dan rinci, lebih-lebih apabila orang tersebut tidak bersikap terbuka. Banyak hal yang merupakan pengalaman seseorang dapat mempengaruhi makna hasil persepsi terhadap kegiatan hubungan antar manusia dalam masyarakat. Selain tergantung dari bentuk dan proses interaksinya, persepsi seseorang sangat tergantung pada banyak faktor yang membentuk pengalaman dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Dalam kaitannya dengan PNPM Mandiri Perkotaan sebagai usaha pemerintah dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat mandiri, maka partisipasi sebagai bentuk keberhasilan program sangat ditentukan oleh persepsi masyarakat terhadap PNPM Mandiri Perkotaan. Persepsi masyarakat terhadap PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sumolawang masih belum diketahui. Berdasarkan permasalahan tersebut perlu adanya penelitian untuk membahas persepsi masyarakat karena dengan diketahui persepsi masyarakat Pemerintah dapat berbenah diri untuk memberikan program yang maksimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan diangkat ialah bagaimana persepsi masyarakat terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan dalam pemerataan kesejahteraan rakyat di Desa Sumolawang?. Dari rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini ialah mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan dalam pemerataan kesejahteraan rakyat di Desa Sumolawang.

## **METODE**

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kualitatif dengan Metode Penelitian Deskriptif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu menggambarkan fenomena dan fakta yang terjadi di masyarakat mengenai adanya PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sumolawang. Menurut Sugiyono (2015:8), metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.

Penelitian Deskriptif adalah salah satu jenis metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, obyek, kondisi, sistem pemikiran, ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-

sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sehingga penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai persepsi masyarakat terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan dalam pemerataan kesejahteraan rakyat di Desa Sumolawang.

Dalam penelitian ini, karakteristik subjek penelitian adalah masyarakat Desa Sumolawang baik yang mendapatkan pinjaman dana bergulir PNPM Mandiri Perkotaan atau tidak. Pemilihan subjek dengan metode purposive, dengan memilih orang yang dianggap benar-benar memahami realitas yang terjadi. Dalam menentukan subjek penelitian memang perlu sebuah kerasionalan yang jelas, alasan subjek tersebut dipilih. Jadi sebenarnya bukan hanya asal menentukan saja, namun asumsinya harus ada, dan subjek tersebut merupakan subjek yang paling tepat dan sesuai dengan tema penelitian ini. Sedangkan, Objek penelitian adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Adapun objek penelitian dalam penelitian ini adalah persepsi masyarakat terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan yang ada di Desa Sumolawang.

Lokasi penelitian akan dilakukan di Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto. Dimana didalamnya terdapat aparatur pemerintah dan PNPM Mandiri yang memiliki fungsi, tugas serta tanggung jawab yang sangat penting dalam proses peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Sumolawang. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah karena di desa tersebut terdapat potensi SDM yang dapat dikembangkan melalui kebijakan PNPM Mandiri Perkotaan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat di Desa Sumolawang.

Fokus dalam penelitian ini adalah persepsi masyarakat terhadap PNPM Mandiri Perkotaan apakah dalam pelaksanaannya di Desa Sumolawang mampu pemerataan kesejahteraan rakyat atau tidak. Menurut Arikunto (1998:144), sumber data adalah suatu subjek darimana suatu data dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder. Menurut Cresweel (2012:274) data primer adalah materi yang mencerminkan secara langsung berasal dari orang atau situasi yang diteliti. Data Primer adalah data yang diperoleh dari informan yang telah dipilih berdasarkan wilayah cakupan penelitian ini. Data primer diperoleh melalui wawancara selama penelitian. Penyaksian terhadap peristiwa itu bisa direkam, didengarkan, dan dirasakan yang kemudian dicatat secara obyektif. Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Sumolawang yang mendapatkan PNPM Mandiri Perkotaan. Hal tersebut didasari oleh pengetahuan,

keterampilan, dan keaktifan masyarakat dalam menjalankan PNPM Mandiri Perkotaan. Menurut Cresweel (2012:214) data sekunder adalah data yang bersumber dari hasil penelitian orang lain yang dibuat untuk maksud berbeda. Data tersebut berupa fakta, tabel, gambar, dan lain sebagainya.

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian maka yang dijadikan teknik pengumpulan data adalah (1) Wawancara/*Interview* adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2014:176). Wawancara dilakukan untuk mencari data tentang apa yang diketahui informan terhadap data yang diperlukan. Selain itu wawancara dilakukan untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap PNPM Mandiri Perkotaan demi menjawab rumusan masalah penelitian. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan semi terstruktur karena peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis untuk mengumpulkan data yang dicari namun tidak menutup adanya pertanyaan terbuka. dan (2) Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2015:240). Metode dokumentasi mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabat, majalah, prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto: 2013).

Nasution (dalam Sugiyono, 2015:306) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya bahwa segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Sehingga Sugiyono (dalam Prasetyo, 2016:307) menyatakan bahwa awal mulanya permasalahan belum jelas dan pasti, maka yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri. Tetapi setelah masalah yang dipelajari jelas, maka dapat dikembangkan suatu instrumen.

Analisis data dalam penelitian ini ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2015:255). Menurut Moleong (2014, 280-281), "Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis

kerja seperti yang disarankan oleh data". Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah (1) Pengumpulan Data/*Data Collection* yang merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi, (2) Reduksi Data/*Data Reduction* diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan, (3) Display Data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan, dan (4) Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan yang merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan.

Proses analisis data diawali dengan menelaah seluruh sumber dengan melalui pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang terjadi dengan melihat aspek subjektif dan tingkah laku serta persepsi masyarakat terhadap PNPM Mandiri Perkotaan. Analisis data tidak bisa dipisahkan dengan melihat catatan di lapangan saat wawancara. Analisis data dilakukan setelah informasi dari hasil wawancara ditranskrip atau disalin. Transkrip yang disalin bersifat menyeluruh, kemudian hasilnya direduksi. Reduksi data merupakan upaya untuk memilih, memusatkan, dan menyederhanakan hasil wawancara, abstraksi, transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan dan memilih data yang relevan dengan tujuan penelitian. Setelah reduksi data dilakukan, data data disajikan dalam bentuk narasi dan simpulan sesuai tujuan penelitian. Temuan data didapatkan dari hasil dokumentasi dan kutipan-kutipan wawancara yang dilakukan setelah dipilih sesuai dengan kebutuhan, yakni berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap PNPM Mandiri Perkotaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Persepsi merupakan suatu proses dimana seseorang melakukan pemaparan dan menyimpulkan informasi berdasarkan pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, persepsi masyarakat terhadap

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan dalam pemerataan kesejahteraan rakyat di Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto adalah pandangan masyarakat terhadap PNPM Mandiri Perkotaan yang merupakan program berbasis pemberdayaan dengan tujuan umum meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.

PNPM Mandiri Perkotaan yang diadakan di Desa Sumolawang bertujuan untuk memberikan nilai positif untuk masyarakat Desa Sumolawag itu sendiri. Karena hal tersebut, tidak hanya persepsi masyarakat sebagai penerima PNPM Mandiri Perkotaan yang bermanfaat membantu Pemerintah untuk meningkatkan program pemberdayaan yang berkualitas untuk masyarakat, tetapi juga persepsi masyarakat yang tidak menerima PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sumolawang akan sangat membantu. Dari hasil penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan dalam pemerataan kesejahteraan rakyat di Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, diperoleh data sebagai berikut.

*Pertama*, Proses Sosialisasi Belum Berjalan dengan Baik. Sosialisasi PNPM Mandiri Perkotaan bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada perangkat pemerintah baik pihak eksekutif maupun legislatif, perguruan tinggi, organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, masyarakat pengusaha, media massa, serta masyarakat umum lainnya. Hal-hal yang disampaikan meliputi kebijakan, pengertian, tujuan, konsep, mekanisme dan hasil-hasil pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan agar terbangun pemahaman, kepedulian, serta dukungan terhadap PNPM Mandiri Perkotaan.

Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di lapangan perlu adanya sinergi masyarakat, pemerintah daerah dan kelompok peduli (swasta, asosiasi, perguruan tinggi, media, LSM, dll) serta kemitraan diantara ketiganya. Untuk itu agar semua pihak terlibat dalam program tersebut maka sosialisasi ke masyarakat luas perlu dilakukan secara intensif. Namun dalam kenyataannya, proses sosialisasi yang ada di Desa Sumolawang belum berjalan secara intensif. Hal ini sesuai dengan pendapat Suyati (penerima PNPM Mandiri Perkotaan) yang menerangkan bahwa masih ada masyarakat Desa Sumolawang yang belum paham apa itu PNPM Mandiri Perkotaan.

“Belum cukup baik soalnya masyarakat yang tidak mengikuti PNPM Mandiri Perkotaan mengira kalau program ini sama saja dengan koperasi simpan pinjam dan program pembangunan saja. Padahal kan beda. Selain dana yang diberikan ada juga proses

pemberdayaan dan proses pembekalan untuk menggali potensi yang dimiliki masyarakat untuk dikembangkan.”

Selain adanya masyarakat yang belum paham tentang apa itu PNPM Mandiri Perkotaan, ada juga masyarakat yang belum paham bagaimana cara mendapatkan program ini, seperti yang diungkapkan oleh seorang ibu yang berprofesi sebagai penjahit ini, Kusmiyati juga mengutarakan pendapat yang sama.

“Sosialisasi yang ada sepertinya belum berjalan secara baik. Karena terkadang ada beberapa orang yang belum paham bagaimana cara untuk mendapatkan program.”

Sosialisasi bisa dikatakan intensif apabila dilakukan secara terus menerus sepanjang pelaksanaan. Namun yang ada masyarakat menganggap bahwa selama ini tidak ada program sosialisasi yang berjalan. Seperti yang diungkapkan oleh Kusmiyati bahwa penyuluhan yang pernah dilakukan hanya saat awal adanya program.

“Gak ada mbak setahu saya. Ya tahunya dari tetangga ke tetangga. Awal-awal ada kegiatan ini pernah ada masyarakat dikumpulkan di balai desa. Tapi seterusnya gak ada pemberitahuan apa-apa lagi mbak.”

Tidak berbeda dengan Kusmiyati dan Mustofa, Lestari juga menyatakan pendapat yang sama bahwa selama ini sosialisasi yang ada masih sangat minim. Tidak ada kegiatan sosialisasi sepanjang pelaksanaan program.

“Gak ada mbak setahu saya. Ya tahunya dari tetangga ke tetangga. Dulu ini pernah ada masyarakat dikumpulkan di balai desa. Tapi seterusnya gak ada pemberitahuan apa-apa lagi mbak. Gak pernah ada kegiatan pengarahan apa-apa lagi. Ya mengalir gitu aja.”

Menurut panduan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan sosialisasi dan penyebarluasan informasi dilakukan melalui berbagai media sosialisasi dan komunikasi secara terus menerus sepanjang pelaksanaan. Tetapi sejauh ini Strategi Komunikasi PNPM Mandiri Perkotaan masih dikatakan belum intensif. Karena belum menyesuaikan dengan keadaan masyarakat Desa Sumolawang yang bisa dikatakan belum mengikuti perkembangan zaman yaitu canggihnya teknologi. Seperti ungkapan oleh Asfiyak berikut.

“Saya in gaptak kalau masalah media sosial. Gak punya HP. Saya juga tidak paham soal media sosial itu seperti apa bentuknya. Maklum sudah tua. Apa itu media sosial saya tidak tahu.”

Selain melalui penyuluhan dan pengarahan, serta media sosial untuk masyarakat desa, informasi melalui selebaran atau informasi di papan informasi tidak pernah ada. Masyarakat merasa kurang informasi tentang PNPM Mandiri Perkotaan. Seperti yang diungkapkan oleh Suyati.

“Papan pengumuman saja bersih mbak. Gak ada informasi apa-apa. Apalagi selebaran, sepanjang ini saya tidak pernah mendapatkan. Yang ada malah diisi iklan-iklan gak jelas gitu”

Tidak berbeda dengan Suyati, Lestari juga mengatakan hal yang sama. Selama ini tidak pernah ada selebaran dan informasi yang ditempelkan di papan informasi.

“Tidak pernah ada selebaran. Kalau soal papan informasi, sejauh ini selalu kosong, tidak pernah ada apa-apa. Selain itu juga papan informasi yang ada tidak bisa menarik perhatian masyarakat untuk melihatnya.”

Suyati dan Lestari adalah seseorang yang tidak bisa mengikuti perkembangan dengan canggihnya media sosial. Mereka berdua yang merasa lemah dengan perkembangan teknologi, harusnya bisa mendapatkan informasi melalui media lain seperti informasi yang ditempelkan di papan informasi. Namun pada kenyataannya, papan informasi yang ada tidak memberikan informasi yang sesuai.

Rofik, salah satu masyarakat yang tidak menerima PNPM Mandiri Perkotaan membenarkan pendapat Suyati, Kusmiati dan Mustofa bahwa proses sosialisasi PNPM Mandiri Perkotaan ini belum berjalan secara baik, terlihat dari rasa kebingungan yang dialaminya untuk mengajukan pinjaman dana bergulir serta bentuknya yang dianggap menyerupai Koperasi Simpan Pinjam yang telah ada.

“....setahu saya selama ini sih sama kayak koperasi simpan pinjam. Kita bisa minjam asal sanggup untuk mengembalikan dana yang kita pinjam dan biasanya dalam bentuk angsuran.”

Sosialisasi dan penyebarluasan informasi yang baik bias dilakukan melalui berbagai media sosial dan komunikasi secara terus-menerus sepanjang pelaksanaan program. Sosialisasi diberikan untuk memberikan informasi terkait kebijakan, pengertian, tujuan, konsep, mekanisme dan hasil-hasil pelaksanaan PNPM Mandiri agar terbangun pemahaman, kepedulian, serta dukungan terhadap PNPM Mandiri.

*Kedua*, Proses Pembagian Dana Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Masih Dipengaruhi Perbedaan Akses Masyarakat. PNPM Mandiri Perkotaan adalah salah satu program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengentasan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di tingkat perdesaan dan perkotaan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. PNPM Mandiri Perkotaan dilaksanakan sesuai dengan proses partisipatif, kesadaran kritis, dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin yang ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan lagi objek melainkan sebagai subjek dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pemerintah sendiri berupaya agar

penyaluran PNPM Mandiri Perkotaan ini merata, dan melalui program ini masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Adanya perbedaan pandangan mengenai proses pembagian dana bergulir PNPM Mandiri Perkotaan yang dilaksanakan di Desa Sumolawang dari masyarakat penerima dan bukan penerima. Bagi masyarakat yang menerima pinjaman PNPM Mandiri Perkotaan bisa dikatakan berjalan dengan lancar karena dalam pelaksanaannya telah merata. Hal ini disampaikan oleh Kusmiyati.

“....sudah merata untuk masyarakat. Dari 4 dusun yang ada, pembagian itu adil mbak. Program kan untuk masyarakat Sumolawang, ya harus merata untuk masyarakat Sumolawang.”

Begitulah ungkapan ibu dari dua anak tersebut yang dibenarkan oleh Asfiyak bahwa dari keempat dusun yang ada, program yang diberikan pada masing-masing dusun sudah merata dan adil.

“....sudah merata ke seluruh dusun kok. Dari Dusun Sumolawang, Dusun Pohgurih, Dusun Padangan, dan Dusun Balonglombok tidak ada perbedaan banyak. Cukup adil setahu saya. Kalaupun ada yang merasa tidak adil dan tidak merata pasti banyak masyarakat yang protes, tapi nyatanya tidak pernah ada yang protes soal pembagian dana bergulir yang diberikan ini.”

Dalam hal pemerataan baik pembangunan maupun ekonomi tidak boleh disalurkan secara merata atau disamakan, karena mengingat kondisi atau kebutuhan tiap-tiap daerah itu berbeda-beda. Dalam pemerataan yang akan dituju, perlu diperhitungkan secara cermat kondisi setiap daerah-daerah yang dituju untuk menentukan sistem alokasinya. Masyarakat di Desa Sumolawang juga paham bahwa pemerataan bukan berarti jumlah kuantitas sama, tapi juga harus diperhitungkan kondisi dan kebutuhan tiap daerah. Seperti yang diungkapkan oleh Mustofa (Penerima PNPM Mandiri Perkotaan).

“....ya enggak berdasarkan jumlah bisa dikatakan merata. Kan harus dilihat dulu siapa yang benar-benar membutuhkan. Program ini kan bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin. Jadi ya sepatutnya harus untuk orang yang tepat. Yang sekiranya sudah mampu ya tidak usah lah kasihan orang-orang yang memang belum bisa memenuhi kebutuhannya dengan baik....”

Ungkapan Mustofa menggambarkan bahwa kebutuhan tiap orang pada masing-masing daerah berbeda. Mengingat kondisi di setiap daerah pasti berbeda-beda. Bapak dari 2 orang anak itu mengalami sendiri bahwa kebutuhan sehari-hari jika dilihat dari penghasilannya berjualan mie ayam dengan jumlah tanggungan 3 orang berbeda dengan seseorang yang

memiliki penghasilan berjualan mie ayam dengan jumlah tanggungan 1 orang.

*Ketiga*, PNPM Mandiri Perkotaan Belum Mampu Memeratakan Kesejahteraan Rakyat. Setiap Program yang dilaksanakan akan memberikan hasil sebagai bentuk keberhasilan visi misi. Masyarakat penerima PNPM Mandiri perkotaan memiliki persepsi bahwa PNPM Mandiri Perkotaan mampu pemeratakan kesejahteraan rakyat di Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto. PNPM Mandiri Perkotaan adalah sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin secara mandiri. Kesejahteraan diartikan dengan hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketentraman. Istilah kesejahteraan erat kaitannya dengan tujuan Negara Indonesia. Negara didirikan, dipertahankan dan dikembangkan untuk kepentingan seluruh rakyat yaitu untuk menjamin dan memajukan kesejahteraan umum. Seperti yang diungkapkan oleh Kusmiyati sebagai penerima PNPM Mandiri Perkotaan berikut.

“Iya sudah bisa pemeratakan kesejahteraan kayaknya. Saya saja merasakan hal itu sejauh ini. PNPM sudah bisa membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui pinjaman dana bergulir ini. Selama ini saya merasakan bahwa ada aja masyarakat yang dulunya ekonominya pas-pasan sudah mulai bisa memperbaiki keadaan ekonomi keluarganya.”

Tidak hanya Kusmiyati yang mengutarakan bahwa PNPM Mandiri Perkotaan sudah bisa pemeratakan kesejahteraan rakyat di Desa Sumolawang, Mustofa juga menegaskan hal yang sama bahwa sejauh ini masyarakat sudah mulai memperbaiki keadaan ekonomi akibat program tersebut.

“Sudah lah mbak. Saya saja yang dulunya klimpungan gimana memenuhi kebutuhan yang semakin hari semakin tinggi, sekarang alhamdulillah sudah mulai bisa berbenah memperbaiki kualitas pemenuhan kebutuhan untuk keluarga saya.”

Kesejahteraan umum (keadilan sosial) sebagai tujuan Negara bukan berarti kewajiban Negara untuk menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat, sehingga rakyat tidak berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi dirinya sendiri, akan tetapi rakyat mempunyai hak dan kewajiban untuk mencapai kesejahteraannya. Negara hanya bertugas untuk menciptakan suasana atau keadaan yang memungkinkan rakyat dapat menikmati hak-haknya sebagai warga Negara dan mencapai kesejahteraan mereka semaksimal mungkin. Dalam hal ini, pemerintah mampu memberikan kesejahteraan rakyat di Desa Sumolawang melalui PNPM Mandiri Perkotaan. Hal ini dijelaskan oleh pernyataan Kusmiyati yang mampu memenuhi kebutuhan dasar sandang dan pangan.

“...usaha yang saya buka setelah megikuti program ini, bisa memperbaiki kondisi keuangan dalam memenuhi kebutuhan. Kondisi keuangan akhirnya stabil. Terpenuhinya sandang pangan saja sudah membuat hidup sejahtera...”

Selain Kusmiyati, Suyati juga merasakan bahwa setelah mendapatkan PNPM Mandiri Perkotaan ia mampu mendapatkan penghasilan sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“...saya bisa membantu suami saya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari juga dari hasil usaha menerima pesanan kue yang saya buka. Alhamdulillah banget lah mbak bisa membantu...”

Kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Selain kebutuhan dasar yaitu sandang, pangan, dan papan, masyarakat di Desa Sumolawang juga mampu meningkatkan kesejahteraan dalam hal kebutuhan pendidikan. Lestari adalah seorang ibu yang memiliki dua orang anak yang masih menempuh pendidikan tingkat SD dan tingkat SMP. Lestari mengungkapkan bahwa ia telah mampu mencukupi kesejahteraan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan untuk anak-anaknya.

“...saya akhirnya bisa memiliki pandangan untuk menyekolahkan anak saya sampai SMA. Dulu saya sangat takut sekali tidak bisa memberikan pendidikan yang sesuai dengan aturan wajib belajar 12 tahun. Tapi dengan mendapatkan prgram ini saya bisa mendapatkan penghasilan tambahan untuk membantu suami saya mencari nafkah dan memberikan pendidikan ke anak saya.”

Selain Lestari, Milah adalah seorang ibu yang mampu melewati ketakutan apabila tidak bisa memberikan pendidikan yang layak untuk seorang anak. Dari hasil membuka usaha warung kopi, Milah bisa membantu suami memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Alhamdulillah bisa nyekolahkan anak sampai sekarang yang sebentar lagi masuk SMA. Padahal dulu ibu takut sekali gak bisa nyekolahkan anak sampai SMA. Tahu sendiri sekarang pendidikan wajib 12 tahun.”

Masyarakat yang tidak menerima PNPM Mandiri Perkotaan memiliki persepsi bahwa program tersebut belum bisa pemeratakan kesejahteraan rakyat. Karmi adalah seorang ibu dari dua anak yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Karmi mengutarakan bahwa selama ini PNPM Mandiri Perkotaan belum mampu pemeratakan kesejahteraan rakyat.

“Belum sampai merata secara keseluruhan. Masih ada masyarakat yang kesejahteraannya belum stabil. Iya mungkin kalau untuk yang mendapatkannya mungkin bisa memberikan

kesejahteraan. Tapi bagi yang tidak menerima ya tidak berpengaruh apa-apa lah.”

Tidak hanya Karmi yang memiliki persepsi bahwa PNPM Mandiri Perkotaan selama ini belum berhasil pemerataan kesejahteraan rakyat, Rofik juga mengungkapkan bahwa sejauh ini proses pemerataan kesejahteraan rakyat belum berhasil karena masih ada masyarakat yang memiliki keadaan ekonomi rendah.

“Belum bisa berhasil pemerataan kesejahteraan rakyat kok sejauh ini. Kenyataannya masih banyak masyarakat yang perekonomiannya pas-pasan di Desa Sumolawang.”

Masyarakat bisa memiliki persepsi bahwa PNPM Mandiri Perkotaan belum bisa pemerataan kesejahteraan rakyat karena selama ini proses pembagian yang ada tidak sesuai. Karmi mengutarakan bahwa masih ada masyarakat yang menginginkan PNPM Mandiri Perkotaan, tetapi tidak bisa mendapatkan.

“Tyakan tapi ada masyarakat yang memang membutuhkan tapi tidak mendapatkan program. Jadi ya sama saja siapa yang mendapatkan PNPM ya itu saja yang bisa meningkatkan kesejahteraannya. Ya soalnya kan program itu sejenis pinjaman. Yang namanya masyarakat kalau ada modal untuk usaha ya senang-senang saja lumayan bisa membuka usaha sendiri agar tidak bergantung pada orang. Tapi kembali lagi pada masing-masing orangnya. Orang yang akan meminjam itu sanggup atau tidak untuk mengelola pinjaman itu agar bisa memberikan hasil yang baik untuk memiliki kesejahteraan yang stabil.”

Selain adanya masyarakat yang menginginkan tetapi tidak bisa mendapatkan karena kurang percaya diri bisa mengelola dan mengembalikan pinjaman dana bergulir dengan baik, ada juga masyarakat yang menginginkan tetapi tidak bisa karena terhalang kriteria yang tidak diketahui dengan pasti bagaimana proses penyalangan yang dilakukan, hal itu diungkapkan oleh Rofik yaitu seorang ibu rumah tangga yang memiliki satu orang anak.

“Bagaimana bisa pemerataan, kalau ada yang ingin mengajukan tapi tidak mendapatkan. Ya katanya itu diperhitungkan pendapatannya berapa, tanggungannya berapa. Tapi kan ya sama saja. Meskipun pendapatannya dikatakan stabil dan jumlah tanggungan sedikit tapi kalau tingkat kebutuhan tiap hari lebih tinggi daripada pendapatan kan ya harusnya diperhitungkan juga. Semuanya sekarang serba mahal. Kebutuhan sehari-hari juga semakin tinggi.”

Masyarakat yang menginginkan tetapi terhalang karena kurangnya percaya diri masyarakat untuk mengajukan pinjaman dana bergulir dan juga kriteria penerima yang belum sesuai, masyarakat juga menyayangkan bahwa selama ini dirasakan bahwa penerima PNPM Mandiri Perkotaan setiap tahunnya tidak

memiliki banyak perubahan seperti yang diungkapkan oleh Sumini.

“Bagaimana bisa pemerataan mbak kalau sampai saat ini penerima dari tahun ke tahun itu-itu saja tidak ada yang berbeda. Iya tidak ada perubahan atau penambahan sih kayak e. Setahu saya penerimanya tetap itu-itu saja.”

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.

*Keempat*, Proses Pemberdayaan yang dilakukan Belum Optimal. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan merupakan suatu program pemerintah untuk mengatasi kemiskinan berbasis pemberdayaan kepada masyarakat miskin yang salah satu komponen programnya yaitu BLM (Bantuan Langsung Masyarakat). Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kementerian Dalam Negeri. Namun dalam kenyataannya proses pemberdayaan yang terjadi di Desa Sumolawang belum berjalan dengan baik. Dilihat dari kegiatan-kegiatan pemberdayaan, intensitas pelaksanaannya masih sangat minim seperti yang diungkapkan oleh Milah.

“...lah itu nduk yang belum optimal. Program-program pemberdayaan yang diberikan masih minim. Masyarakat kan butuh wawasan untuk menemukan potensi yang dimilikinya...”

Sejalan dengan pemikiran Milah, Kusmiyati juga menegaskan pendapat yang sama bahwa selama ini kegiatan-kegiatan dalam proses pemberdayaan belum berjalan secara optimal.

“...pemberdayaan yang pernah diberikan itu seminar pengetahuan tentang wirausaha, pelatihan PKM dan KSM, lalu pelatihan kerja seperti memasak. Pengetahuan tentang wirausaha itu mbak yang memberikan motivasi agar saya bisa membuka usaha sendiri buka toko dan menerima pesanan jahitan masker sama sarung tangan hasil dari bekal saya bisa menjahit. Tapi yang saya itu heran kenapa pemberdayaan yang diberikan itu jarang sekali. Padahal sangat bermanfaat lho untuk masyarakat...”

Pernyataan Milah dan Kusmiyati dibenarkan oleh ungkapan Asfiyak terkait pandangannya melihat proses pemberdayaan yang berjalan.

“Saya rasa proses pemberdayaan yang berjalan belum bisa dikatakan baik. Setidaknya setahun sekali atau 2 tahun sekali akan sangat membantu masyarakat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Karena setiap tahun yang mengikuti

pasti ada yang mundur ada yang tambah. Dalam artian masyarakat yang merasa tingkat kesejahteraannya sudah stabil dan tidak lagi membutuhkan pinjaman dana bergulir akan mundur dan tidak mengajukan lagi sedangkan masyarakat lain yang baru mengajukan membutuhkan proses pemberdayaan untuk menemukan dan meningkatkan potensinya. Jadi sebaiknya proses pemberdayaan yang diberikan diatur dengan baik.”

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. Pemberdayaan yang baik akan memberikan harapan kepada masyarakat untuk bisa mengembangkan potensi yang dimilikinya dalam membuka peluang usaha. Seperti yang diungkapkan oleh Suyati.

“...Pemberdayaan yang diberikan sangat membantu mbak terutama Lembaga Pelatihan Kerja. Waktu memberikan pelatihan memasak, saya sangat bersemangat memperhatikan karna saya suka membuat kue. Waktu itu ya mbak kami diberikan pelatihan membuat kue terbaru dan jenis kue-kue yang unik untuk jajanan. Akhirnya saya bisa mengikuti tren sekarang kayak kue apa yang sekarang sedang laris dan kue apa yang banyak dcari masyarakat.”

Mustofa juga mengutarakan bahwa pemberdayaan yang optimal sangat diharapkan untuk menemukan dan mengembangkan potensi yang dimiliki.

“...pernah waktu itu diadakan pemberdayaan tentang seminar wirausaha sama pelatihan KSM dan PKM. Jadi waktu itu saya diberikan pengetahuan tentang wirausaha, bagaimana membuka usaha sendiri, bagaimana mencari peluang usaha, serta bagaimana menglola usaha dengan benar. Proses pemberdayaan itu menumbuhkan motivasi saya untuk menciptakan peluang usaha sendiri. Kalau saja pemberdayaan yang diberikan lebih optimal mungkin saya bisa menemumakn potensi yang saya miliki untuk dikembangkan....”

Pandangan tersebut membuktikan bahwa masyarakat sangat mengharapkan proses pemberdayaan bisa berjalan secara optimal. Pemberdayaan pada dasarnya adalah penciptaan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat bisa berkembang. Logika tersebut didasarkan pada asumsi bahwa setiap masyarakat pasti memiliki daya namun terkadang mereka tidak menggali potensinya untuk dikembangkan atau bahkan potensi tersebut belum

disadari adanya. Meskipun demikian pemberdayaan sebaiknya tidak menjadi jebakan untuk masyarakat agar ketergantungan, namun pemberdayaan harus bisa mengantarkan pada proses kemandirian.

*Kelima*, Pelayanan yang diberikan Relatif Mudah. Salah satu tujuan khusus PNPM adalah meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan terutama kepada masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin. Sesuai dengan tujuan tersebut, dalam strategi operasional akhirnya pemerintah memberikan kebijakan untuk mengoptimalkan peran sektor dalam pelayanan dan kegiatan pembangunan secara terpadu.

Kelembagaan di instansi pemerintah terlebih yang berkaitan dengan layanan langsung kepada masyarakat harus menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan yang dinamis, sederhana dalam tuntutan dan harapan masyarakat. Proses pelayanan yang diberikan oleh para pelaksana PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sumolawang tergolong mudah dan cepat. Seperti yang dijelaskan oleh Suyati, yaitu seorang ibu rumah tangga yang akhirnya berani membuka usaha pesanan kue.

“Pelayanan yang diberikan saya rasa cukup baik, tidak ruwet, dan tidak menyusahkan masyarakat. Masyarakat dimudahkan sekali untuk mendapatkan program PNPM ini.”

Tidak berbeda dengan pendapat Suyati, Asfiyak seorang bapak dari dua orang anak ini juga mengatakan hal yang sama. Pelayanan oleh para pelaksana PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sumolawang berjalan dengan mudah dan cepat.

“Pelayanannya bagus kok. Contohnya ya proses administrasinya tidak susah, penanganannya juga cepat. Alhamdulillah petugasnya tidak neko-neko juga.”

Selain Suyati dan Asfiyak, Lestari juga menegaskan pendapat yang sama bahwa pelayanan yang diberikan sudah baik.

“Pelayanannya baik. Para pelaksananya juga cukup sigap. Kalau ada pelaporan apa-apa langsung ditangani. Apabila ada masyarakat yang menemui kesulitan saat pelaksanaan, pihak yang berangkutan juga bersedia membantu memcari jalan lain.”

Pelayanan yang baik dan kepuasan masyarakat akan memberikan dorongan positif dalam pencapaian keberhasilan suatu program. Segala bentuk pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat maupun di daerah akan meningkatkan peran serta masyarakat dalam berpartisipasi meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi di Desa Sumolawang.

*Keenam*, PNPM Mandiri Perkotaan Mampu Membentuk Sifat Kemandirian Masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga masyarakat bukan lagi objek melainkan subjek upaya penanggulangan kemiskinan. Desa Sumolawang mulai mengikuti PNPM Mandiri Perkotaan sejak tahun 2010. Dalam perkembangannya, diketahui bahwa PNPM Mandiri Perkotaan yang berjalan mampu memberikan dan membentuk sifat kemandirian dalam diri masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Kusmiyati.

“...sudah memberikan sifat mandiri. Melalui potensi masing-masing masyarakat, lalu adanya dana pinjaman bergulir untuk modal usaha ditambah adanya pemberdayaan yang diberikan, saya berani membuka usaha sendiri toko kecil-kecilan sama pesanan jahitan.”

Sependapat dengan Kusmiyati, Suyati juga mengungkapkan bahwa PNPM Mandiri Perkotaan yang berjalan di Desa Sumolawang mampu membentuk sifat kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan tentang wirausaha dan pemberian dana bergulir.

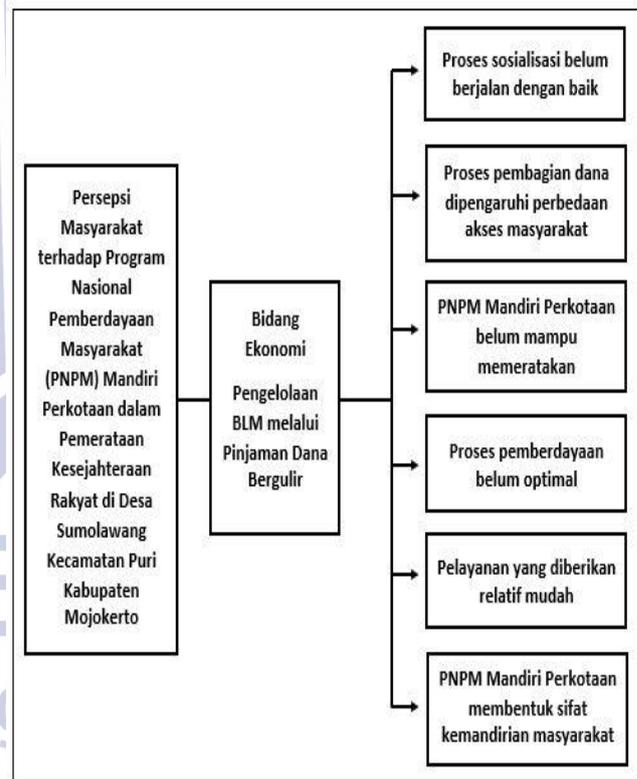
“...membentuk sifat kemandirian. Potensi masyarakat desa sumolawang itu masih banyak yang perlu dikembangkan tapi tersandung adanya modal usaha. Adanya program ini bisa membantu masyarakat menemukan potensinya untuk berani membuka usaha sendiri melalui pemberdayaan tentang kewirausahaan yang pernah diadakan.”

Selain Kusmiyati dan Suyati, Asfiyik juga mengutarakan pendapat yang sama. Adanya program pemberdayaan tentang seminar wirausaha sangat bermanfaat untuk menumbuhkan sifat kemandirian masyarakat untuk berani menemukan peluang membuka usaha sendiri. Tidak hanya sampai pada pemberdayaan saja, pinjaman dana bergulir juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang bisa digunakan untuk modal usaha sebagai bentuk realisasi sifat kemandirian.

“Adanya pembekalan dan seminar berwirausaha, masyarakat mulai berani membuka peluang usahanya sendiri. Potensi yang ada dalam masing-masing masyarakat bisa dimunculkan. Karena sebenarnya masyarakat mampu dalam menumbuhkembangkan potensinya namun ada kendala yaitu melalui modal usaha. Untuk itulah masyarakat akhirnya bisa membuka peluang usaha sebagai bentuk kemandirian masyarakat melalui modal usaha dari pinjaman dana bergulir.”

Sesuai dengan strategi dasar PNPM Mandiri Perkotaan yaitu mengintensifkan upaya-upaya pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat, bisa dikatakan bahwa kemandirian masyarakat Desa Sumolawang sudah cukup mencerminkan tercapainya strategi tersebut.

PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan.



Gambar 1. Persepsi Masyarakat terhadap PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sumolawang

### Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menggali persepsi masyarakat terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Nasional (PNPM) Mandiri Perkotaan di Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto. Dalam penelitian ini, yang dimaksud persepsi masyarakat terhadap PNPM Mandiri Perkotaan yang merupakan sebuah program pemberdayaan dengan tujuan umum

meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin. PNPM Mandiri Perkotaan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong angka kemiskinan dan pengangguran.

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan didasarkan pada prinsip pembangunan manusia yang artinya masyarakat akan memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata. Melalui program ini, masyarakat bisa mendapatkan hak dan kewenangan mengatur diri sendiri secara mandiri dan bertanggung jawab. PNPM Mandiri Perkotaan dilaksanakan sesuai dengan proses partisipatif, kesadaran kritis, dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin yang ditumbuhkembangkan sehingga masyarakat miskin bukan lagi objek pembangunan melainkan sebagai subjek upaya pembangunan.

Sosialisasi PNPM Mandiri Perkotaan bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada perangkat pemerintahan, baik pihak eksekutif maupun legislatif, perguruan tinggi, organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, masyarakat pengusaha, media massa, serta masyarakat umum lainnya. Hal-hal yang disampaikan meliputi kebijakan, pengertian, tujuan, konsep, mekanisme dan hasil-hasil pelaksanaan PNPM Mandiri agar terbangun pemahaman, kepedulian, serta dukungan terhadap PNPM Mandiri.

Proses sosialisasi PNPM Mandiri Perkotaan yang ada di Desa Sumolawang belum berjalan secara intensif. Masih banyak masyarakat yang tidak mengikuti program tersebut menganggap bahwa PNPM Mandiri Perkotaan adalah program pembangunan sarana desa. Bahkan ada yang menganggap bahwa PNPM Mandiri Perkotaan sama dengan sebuah koperasi simpan pinjam semata. Tidak hanya itu, masalah yang lebih kompleks yaitu adanya masyarakat yang menginginkan untuk mendapatkan PNPM Mandiri Perkotaan namun tidak mengetahui bagaimana cara untuk mendapatkannya. Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di lapangan perlu adanya sinergi masyarakat, pemerintah daerah dan kelompok peduli (swasta, asosiasi, perguruan tinggi, media, LSM, dll) serta kemitraan diantara ketiganya. Untuk itu agar semua pihak terlibat dalam program tersebut maka sosialisasi ke masyarakat luas perlu dilakukan secara intensif. Dalam pelaksanaannya, bisa dikatakan bahwa proses sosialisasi yang ada di Desa Sumolawang belum berjalan secara intensif.

Dalam upaya pengentasan kemiskinan, pemerintah berupaya agar penyaluran PNPM Mandiri ini merata dan melalui program ini masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Program pemberdayaan ini berjalan secara berkelompok atau yang disebut dengan Kelompok Swadaya Masyarakat. Melalui program ini,

masyarakat mengelola Pinjaman Dana Bergulir dari Bantuan Langsung Tunai. Proses pemerataan dilakukan melalui penjarangan dan pemetaan kriteria kemiskinan. Selain melihat kriteria kemiskinan, para pelaksana PNPM Mandiri Perkotaan juga mempertimbangkan potensi yang dimiliki setiap individu yang dapat dikembangkan melalui proses pemberdayaan. Secara merata, masyarakat dapat berpartisipasi dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk dikembangkan. Ikut sertanya masyarakat dalam meningkatkan pembangunan ekonomi melalui PNM Mandiri Perkotaan secara tidak langsung dapat meningkatkan nilai kesejahteraan yang dimilikinya.

Proses pemerataan PNPM Mandiri Perkotaan yang berjalan di Desa Sumolawang mencerminkan langkah kegiatan pemerintah dalam pemerataan pembangunan dan hasilnya mengarah pada terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Program ekonomi dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok seperti bahan makanan, pakaian, kebutuhan pokok lainnya, dan juga pendapatan penduduk sendiri sangat dipengaruhi pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Dalam pemerataan pembangunan dan pemerataan ekonomi yang harus diratakan adalah prosesnya, bukan sekedar hasilnya. Pemberian program diratakan dengan pertimbangan kondisi atau kebutuhan, serta potensi yang dimiliki. Para pelaksana PNPM Mandiri Perkotaan telah memperhitungkan dengan cermat kondisi setiap daerah-daerah yang dituju untuk menentukan alokasinya. Dalam mewujudkan strategi pembangunan yang berlandaskan pemerataan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah membuat pedoman perencanaan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan yang tepat sebagai bentuk mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik, pemerataan, dan keadilan sosial.

Proses pemberdayaan yang optimal akan membantu masyarakat menemukan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Layaknya kegiatan pemberdayaan wirausaha, adalah sebuah program yang mampu memancing motivasi seseorang untuk menemukan peluang usaha dan menemukan inovasi terbaru didukung dengan penggalan potensi yang baik. Proses pemberdayaan akan optimal apabila dilakukan sesuai dengan tahapannya diantaranya yaitu memberikan tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar serta peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Dilanjutkan dengan tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar mampu mengambil peran dan pembangunan. Serta memberikan tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan keterampilan sehingga terbentuk inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantar pada tahap kemandirian.

Proses pemberdayaan yang dilaksanakan oleh PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sumolawang belum berjalan dengan optimal karena setiap tahapan belum dilaksanakan dengan benar. Dilihat dari intensitas pertemuan, masyarakat mengakui bahwa proses yang pemberdayaan yang diberikan sangat jarang dan minim sekali. Meskipun PNPM Mandiri Perkotaan merupakan sebuah program integrasi dan perluasan program-program yang penanggulangan kemiskinan yang sudah berjalan, penggalian potensi sumber daya manusia akan sangat berguna untuk meningkatkan pembangunan ekonomi melalui kemunculan wirausaha-wirausaha baru.

PNPM Mandiri Perkotaan di bidang ekonomi yaitu pengelolaan BLM melalui pinjaman dana bergulir. Dalam pelaksanaannya, proses pendanaan yang cepat adalah bentuk pengelolaan keuangan yang dapat meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat.

Dalam pelaksanaan berbagai kegiatan berbasis masyarakat selama ini sering ditemukan kualitas pemberdayaan masyarakat yang tidak memadai. Failitator yang mendampingi masyarakat hanya berfungsi sebagai tenaga penyuluh teknis terkait sektor tertentu tanpa keahlian mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat. Di sisi masyarakat, hal lain menyebabkan ketergantungan terhadap program sehingga menimbulkan masalah terkait keberlanjutan pasca program berakhir. Namun melalui pengelolaan dana bergulir sebagai modal usaha tersebut masyarakat mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Para pelaksana PNPM Mandiri Perkotaan di masing-masing tingkatan bertanggung jawab pada aktivitas pendanaan dan penyalurannya. Pembayaran dan penyaluran dana PNPM Mandiri Perkotaan yang diberikan dalam bentuk BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) harus berjalan dengan baik. Pengelolaan dana bergulir oleh masyarakat dilaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan pinjaman bergulir yang berorientasi pada masyarakat miskin. Proses pendanaan yang terjadi di Desa Sumolawang sejauh ini bisa didapatkan dengan cepat. Setelah masyarakat mengisi proposal pengajuan dana bergulir secara lengkap untuk dilakukan penyaringan siap yang berhak dan yang tidak, masyarakat yang berhak bisa langsung melakukan proses tanda tangan perjanjian pinjaman bermatras. Selang beberapa hari setelah proses perjanjian proposal dana bergulir yang diajukan bisa didapatkan untuk dikelola secara langsung sebagai modal usaha.

Pelayanan yang baik dan kepuasan masyarakat akan memberikan dorongan positif dalam pencapaian keberhasilan suatu program. Segala bentuk pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat maupun di daerah akan meningkatkan peran serta

masyarakat dalam berpartisipasi meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi di Desa Sumolawang.

Dalam perkembangannya, para pelaksana PNPM Mandiri Perkotaan mampu memberikan pelayanan yang baik di Desa Sumolawang. Pelayanan yang baik tersebut terdapat dua kategori yaitu mudah dan cepat. Para pelaksana memberikan kemudahan untuk masyarakat ketika mengurus administrasi dan membuat pengajuan penerimaan dana. Masyarakat sangat terbantu dengan pelayanan yang ada. Selain pelayanan yang mudah, pelayanan yang diberikan juga cepat. Para pelaksana mampu bekerja dengan sigap membantu masyarakat untuk membantu dan menemukan jalan lain apabila ada laporan masyarakat yang menemui suatu kesulitan dalam pelaksanaan program.

PNPM Mandiri Perkotaan yang berjalan di Desa Sumolawang telah membentuk sifat kemandirian masyarakat. Sesuai dengan segala potensi Sumber Daya Manusia yang ada di Desa Sumolawang, program yang berbasis pemberdayaan ini mampu menumbuhkan keberanian masyarakat dalam menemukan peluang usaha melalui seminar wirausaha dan pelatihan kerja. Sebagai dasar keberanian membuka usaha, masyarakat mampu mengembangkan sifat kemandiriannya dengan menggunakan pinjaman dana bergulir sebagai modal usaha. Sesuai dengan strategi dasar PNPM Mandiri yaitu mengintensifkan upaya-upaya pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat, bisa dikatakan bahwa kemandirian masyarakat Desa Sumolawang sudah cukup mencerminkan tercapainya strategi tersebut.

PNPM Mandiri Perkotaan yang berjalan di Desa Sumolawang hanya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin secara mandiri namun belum bisa pemeratakan kesejahteraan rakyat. Masyarakat penerima PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sumolawang berada dalam keadaan stabil dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut dibuktikan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar yaitu rumah yang layak, tercukupinya sandang dan pangan, tercukupinya pendidikan yang baik, serta kondisi tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.

Berbeda dengan masyarakat yang mendapatkan PNPM Mandiri Perkotaan, masyarakat Desa Sumolawang yang tidak mendapatkan PNPM Mandiri Perkotaan telah memiliki persepsi yang berbeda. Masyarakat yang tidak mendapatkan PNPM Mandiri Perkotaan berpersepsi bahwa PNPM Mandiri Perkotaan yang sudah berjalan sejak tahun 2010 belum mampu pemeratakan kesejahteraan rakyat di Desa Sumolawang. Masih adanya masyarakat dengan keadaan ekonomi yang tergolong rendah serta masih kurangnya pemenuhan kebutuhan sehari-hari telah membentuk sudut pandang yang berbeda. Selain itu, masyarakat juga merasakan

bahwa selama ini masih banyak masyarakat yang menginginkan untuk mendapatkan PNPM Mandiri Perkotaan namun tidak bisa menjangkau. Dengan berbagai alasan yaitu kurangnya kepercayaan diri masyarakat untuk mengajukan karena takut tidak mampu mengelola dengan baik, adanya masyarakat yang terhambat adanya kriteria yang kurang sesuai, serta adanya masyarakat yang tidak memiliki kesanggupan dalam mengembalikan angsuran pinjaman dana bergulir membuat masyarakat memiliki persepsi yang berbeda. Tidak hanya karena beberapa alasan tersebut, masarakat selama ini tidak pernah merasakan upaya nyata yang pernah dilakukan agar PNPM Mandiri Perkotaan bisa pemeratakan kesejahteraan rakyat.

PNPM Mandiri Perkotaan yang berjalan di Desa Sumolawang telah memberikan persepsi yang berbeda pada masing-masing masyarakatnya. Masyarakat yang menerima PNPM Mandiri perkotaan memiliki persepsi bahwa program tersebut telah berjalan dengan baik di Desa Sumolawang. Dilihat dari proses pembagian yang merata, proses pendanaan yang cepat, pelayanan yang mudah dan cepat, mampu membentuk sifat kemandirian masyarakat, serta mampu pemeratakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Desa Sumolawang. Meskipun proses sosialisasi yang belum berjalan secara intensif dan proses pemberdayaan yang diberikan dianggap belum berjalan secara optimal, namun masyarakat Desa Sumolawang mengatakan bahwa PNPM Mandiri Perkotaan yang telah berjalan adalah sebuah program yang sangat membantu dan bisa mengurangi angka kemiskinan di Desa Sumolawang meskipun dalam taraf yang belum signifikan. Sedangkan masyarakat yang gagal menerima PNPM Mandiri Perkotaan memiliki persepsi yang berlawanan bahwa selama ini PNPM Mandiri Perkotaan belum bisa pemeratakan kesejahteraan rakyat.

Persepsi yang diungkapkan oleh masyarakat Desa Sumolawang ini sesuai dengan dalil persepsi Kretch dan Crutchfield yang pertama dan yang kedua yaitu (1) Dalil pertama mengatakan bahwa persepsi bersifat selektif secara fungsional yang berarti bahwa objek-objek yang mendapat tekanan dalam persepsi biasanya objek-objek yang memenuhi tujuan individu melakukan persepsi. Seperti kondisi yang terjadi, PNPM Mandiri Perkotaan adalah sebuah objek yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan. Di Desa Sumolawang terdapat banyak sumber daya manusia yang memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan secara mandiri. Dari penjelasan tersebut bisa diketahui bahwa secara fungsional PNPM Mandiri Perkotaan dalam pelaksanaannya akan menimbulkan persepsi pada masyarakat yang terkait, dan (2) Dalil kedua mengatakan

bahwa medan perseptual dan kognitif selalu diorganisasikan dan diberi arti yaitu mengorganisasikan stimuli dengan melihat konteksnya, walaupun stimuli yang diterima itu tidaklah lengkap, tetapi akan membentuk interpretasi yang konsisten dengan rangkaian stimuli yang dipersepsi. Masyarakat Desa Sumolawang menganggap bahwa PNPM Mandiri Perkotaan yang dilaksanakan di Desa Sumolawang telah berjalan dengan baik dan sangat bermanfaat untuk masyarakat. Meskipun sosialisasi belum intensif dan program pemberdayaan yang diterima belum optimal, masyarakat menyadari bahwa pembagian program sudah berjalan secara merata keseluruh dusun, pelayanan yang diberikan mudah dan cepat, pendanaan berjalan cepat, membentuk sifat kemandirian masyarakat, dan mampu memberikan kesejahteraan rakyat dalam bentuk pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan serta kebutuhan akan pendidikan.

Persepsi yang diasumsikan masyarakat Desa Sumolawang yang mengharapkan peningkatan mutu proses pemberdayaan dalam PNPM Mandiri Perkotaan menunjukkan motivasi para penerima program agar bisa meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya dan mampu hidup mandiri. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah faktor fungsional. Hal ini sesuai dengan pendapat Krech dan crutchfield (Rakhmat, 2012:55-62) yang dikemukakan dalam beberapa faktor antara lain (a) Faktor Fungsional adalah faktor yang berasal dari kebutuhan, pengalaman, motivasi, perhatian, emosi, suasana hati, dan hal-hal lain yang termasuk apa yang disebut sebagai faktor-faktor personal. Faktor fungsional yang menentukan persepsi adalah obyek-obyek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi. Yang menentukan persepsi bukan bentuk atau jenis stimuli tetapi karakteristik orang yang memberikan respon pada stimuli tersebut, dan (b) Faktor Struktural adalah faktor yang berasal dari luar individu seperti lingkungan, budaya, hukum yang berlaku, serta nilai-nilai dalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap persepsi seseorang.

Faktor fungsional yang digunakan masyarakat Desa Sumolawang yang mengatakan bahwa PNPM Mandiri Perkotaan adalah sebuah program yang membantu tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu berasal dari (a) Kebutuhan, pengalaman masa lalu, faktor personal. Tingginya angka kebutuhan di era globalisasi saat ini merupakan suatu kebutuhan personal tiap manusia. Melalui program yang berbasis pemberdayaan ini seseorang belajar dari masa lalu untuk menghadapi tantangan di masa depan serta menciptakan kehidupan yang sejahtera dalam pemenuhan kebutuhan hidup. PNPM Mandiri Perkotaan adalah program pengembangan potensi, peningkatan kapasitas manusia,

didukung dengan modal pinjaman dana bergulir dan proses pemberdayaan akan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat miskin secara mandiri. Jika dilihat lagi dari indikator kesejahteraan, masyarakat bisa memiliki persepsi yang berbeda karena masing-masing masyarakat memiliki tingkat harapan hidup yang berbeda, memiliki keinginan untuk menyelesaikan pendidikan anaknya dalam tingkat yang berbeda, konsumsi energi listrik yang berbeda, konsumsi kebutuhan sandang dan pangan yang berbeda, serta pendapatan yang berbeda, dan (b) Karakteristik orang yang memberikan respon pada stimuli. Dapat dilihat dari keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Selalu TIM Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan No 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum PNPM Mandiri yang diharapkan agar PNPM Mandiri dilaksanakan sesuai dengan proses partisipatif, kesadaran kritis, dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin yang ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan lagi objek melainkan sebagai subjek upaya penanggulangan kemiskinan. Maka PNPM Mandiri Perkotaan yang merupakan sebuah program pemberdayaan memiliki peran penting dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Keberadaan sumber daya manusia sendiri sangat penting karena manusia dianggap memiliki potensi, kreativitas, karya, dorongan, dan peran yang nyata. Tujuan pemberdayaan yang diberikan adalah untuk menemukan letak potensi yang mampu dikembangkan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan manusia itu sendiri.

Hubungan faktor fungsional dan dalil persepsi yang dikemukakan oleh Krech dan Crutchfield dalam pembahasan penelitian ini adalah PNPM Mandiri Perkotaan yang diadakan di Desa Sumolawang merupakan sebuah program pemberdayaan yang harus didukung dan dijalankan dengan baik oleh masyarakatnya. Tujuan diadakannya program tersebut tidak lain adalah untuk memberikan kesejahteraan rakyat yang merata ke seluruh masyarakat. Adanya tanggapan dari masyarakat Desa sumolawang yang mengharapkan peningkatan mutu proses sosialisasi dan proses pemberdayaan serta program yang bisa menjangkau seluruh lapisan masarakat akan menjadi masukan dalam pelaksanaannya di masa depan.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait persepsi masyarakat terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Desa Sumolawang menyatakan bahwa proses sosialisasi PNPM Mandiri Perkotaan belum dirasa efektif.

Terbatasnya pengetahuan tentang kebijakan PNPM Mandiri Perkotaan membuat akses informasi sangat sedikit. Selain itu, adanya perbedaan pandangan terhadap proses pembagian dana bergulir PNPM Mandiri Perkotaan sangat terasa bagi penerima dan bukan penerima. Bagi penerima dana bergulir PNPM Mandiri Perkotaan, pembagian dana bergulir sudah merata. Namun masyarakat bukan penerima merasakan bahwa proses pembagian dana belum merata, hal ini disebabkan banyak yang menginginkan tapi kenyataannya tidak bisa mendapatkan karena jumlah tanggungan dalam keluarga masih sedikit. Perbedaan pandangan juga terdapat pada proses pemerataan kesejahteraan rakyat. Perbedaan pandangan tersebut terjadi karena akses masyarakat untuk mendapatkan program tersebut terdapat ketimpangan.

Namun dalam proses pemberdayaan yang dilakukan belum menunjukkan keoptimalan, baik dari persepsi penerima maupun bukan penerima PNPM Mandiri Perkotaan. Pelayanan yang relatif mudah juga dirasakan oleh penerima maupun bukan penerima PNPM Mandiri perkotaan, sehingga PNPM Mandiri Perkotaan dapat membentuk sifat-sifat kemandirian masyarakat itu sendiri.

Sesuai dengan teori yang digunakan, persepsi masyarakat Desa Sumolawang memiliki hubungan dengan Teori Gestalt. Menurut Teori Gestalt, persepsi adalah proses pemaparan terhadap suatu objek dalam bentuk tanggapan atau penerimaan langsung dari seseorang sesuai dengan pengalaman yang dialami. Apabila mempersepsikan sesuatu, maka yang dipersepsikan harus sebagai suatu keseluruhan. Jika hasil penelitian dikaitkan teori tersebut, hasil persepsi masyarakat Desa Sumolawang telah mengungkapkan dan menggambarkan tentang suatu objek yaitu PNPM Mandiri Perkotaan sesuai dengan pengalaman. PNPM Mandiri Perkotaan yang dilaksanakan di Desa Sumolawang telah memberikan akses kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial namun pada proses sosialisasi, pemerataan, dan pemberdayaan perlu diperbaiki.

### **Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diharapkan agar Pemerintah meningkatkan proses sosialisasi, pemerataan, dan proses pemberdayaan. Selain itu juga perlu dibenahi aturan pelaksanaan dalam buku pedoman pelaksana PNPM Mandiri, agar para pelaksana dapat memberikan proses sosialisasi, pemerataan, dan pemberdayaan yang lebih berkualitas dan efektif untuk kedepannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Referensi :**

- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian: Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Creswell, John W. 2012. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari dan Martini Hadari. 1992. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rakmat, Jalaludin. 2012. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Rosdakarya.
- Royat, Sujana (Penangg.Jwb). 2008. *Pedoman Pelaksanaan Strategi Komunikasi PNPM Mandiri*. Jakarta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Citra Utama.
- Suparjan, Hempri Suyatna. 2003. *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Sutopo, H.B. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.

